

MENYOAL PEMBANGUNAN HUNIAN MODERN DI KOTA BEKASI DALAM PERSPEKTIF ETIKA PEMBANGUNAN

Anisa Pramitasari

Universitas Krisnadwipayana
Kampus Unkris Jatiwaringin-Pondok Gede Jakarta Timur 13077
Email: anisa290491@gmail.com

ABSTRAK

Urbanisasi dan mobilisasi yang sangat tinggi di perkotaan meningkatkan permintaan hunian atau tempat tinggal. Rencana tata ruang dan wilayah sebuah kota harus dibuat sedemikian rupa agar dampak yang ditimbulkan tidak bertentangan nilai-nilai keadilan sosial sebagai bagian dari etika pembangunan. Penelitian ini akan membahas beberapa kasus pembangunan hunian di Kota Bekasi dalam perspektif etika pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisis dari penelusuran beberapa data dan informasi yang telah penulis dapatkan menunjukkan bahwa perkembangan hunian berupa apartemen dan perumahan di Kota Bekasi belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi ideal yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ijin pembangunan diberikan, namun di beberapa kasus tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan. Protes serta kerugian lingkungan adalah dampak yang dirasakan oleh kelompok masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Kata Kunci : Etika Pembangunan, Keadilan Sosial, Pembangunan Hunian Modern

ABSTRACT

Urbanization and high mobilization increases demand for housing. Spatial and territorial plan of a city must be design in such a way to resulting impacts do not conflict with the values of social justice as part of development ethics. This research will discuss several cases of residential development in Bekasi City from the perspective of development ethics. The research method used descriptive. The analysis from tracing some of the data and information that the author has obtained shows that the development of housing form of apartments and housing in Bekasi City has not fully represented the ideal conditions expected by the community. The development permits granted in some cases do not involve local communities in the decision-making process. As a result, protest and environmental loses are felt by community groups around the construction sit.

Keywords: *Development Etics, Social Justice, Development of Modern Housing*

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat saat ini telah banyak meninggalkan pedesaan dan pindah ke kota. Daya tarik perkotaan membuat kehidupan pertanian di desa tidak lagi menarik bagi sebagian orang. Fenomena abad 21 semakin menunjukkan bahwa

manusia cenderung meninggalkan lingkungan alam. 40% penduduk memilih tinggal di perkotaan. Seperti populasi urbanisasi pulau jawa, tahun 1996 tercatat 54,6 juta jiwa; tahun 2018 naik menjadi 146,9 juta jiwa; tahun 2035 diprediksi akan tumbuh sebesar 11,82% menjadi 167,3 juta

jiwa atau naik sebesar 3 kali lipat dari tahun 1996 (Deliyanto dan Sumartono, 2018). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa 54% penduduk dunia tinggal di perkotaan dan akan naik di tahun 2050 menjadi 80% (United Nation, 2014).

Berkembangnya wilayah perkotaan menimbulkan persoalan yang serius jika tidak dilakukan perencanaan pembangunan yang matang. Perkembangan kota yang semakin padat akan memberikan dampak kecenderungan pada pinggiran kota. Hal tersebut disebabkan karena perkotaan hanya dijadikan tempat transit untuk aktifitas perdagangan dan industrialisasi. Setelah kegiatan tersebut selesai sebagian besar dari mereka kembali ke tempat tinggal mereka di pinggiran kota.

Persoalan yang kemudian tidak dapat terbantahkan adalah berkurangnya lahan terbuka akibat tingginya kebutuhan permukiman, penyempitan jalan, kemacetan, degradasi kualitas lingkungan, krisis infrastruktur, resiko bencana dan dalam derajat tertentu aparat pemerintah terlihat belum memiliki kesiapan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan.

Sejarah mencatat bahwa sistem pembangunan di Indonesia telah dicanangkan sejak REPELITA II tahun

1974-1978. Pembangunan nasional dilaksanakan melalui sistem regionalisasi atau perwilayahan, dengan kota-kota utama sebagai kutub atau pusat pertumbuhan. Tujuan dari pembangunan pusat pertumbuhan diharapkan dapat menyebarkan kemajuan di seluruh wilayah atau dapat diartikan sebagai upaya menciptakan pemerataan pembangunan.

Salah satu kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai kutub pusat pertumbuhan adalah Jakarta. sebagai pusat pertumbuhan, kepadatan penduduk Jakarta memicu banyak masalah perkotaan seperti yang telah disampaikan di muka. Intruksi Presiden No.13 bulan Juli 1976, diadakanlah pengembangan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk meringankan tekanan penduduk Jakarta yakni dengan cara membina pola pemukiman perkotaan dan penyebaran kesempatan kerja.

Praktik pembangunan pusat pertumbuhan mengakibatkan derajat ketergantungan yang cukup tinggi bagi wilayah di sekitarnya terutama dalam bidang ekonomi. Hirschman sebagai ilmuwan penggagas teori pusat pertumbuhan menjelaskan adanya ketidakseimbangan dalam pembangunan pusat pertumbuhan (1958). Secara geografis, Hirschman

menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang. Dalam proses pertumbuhan yang tidak seimbang selalu dapat dilihat bahwa kemajuan disuatu tempat (titik) menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan, dan dorongan-dorongan kearah perkembangan pada tempat-tempat (titik-titik) berikutnya.

Secara empiris, kelemahan atas teori pusat-pinggiran terjadi di Indonesia dimana Jakarta sebagai pusat dan kota-kota di sekitarnya sebagai pinggiran/penyangga. Jakarta dianggap telah menawarkan kebutuhan lapangan kerja cukup tinggi. Kondisi tersebut mendorong kota-kota lain yang akhirnya menjadi pilihan tempat tinggal bagi penduduk Jakarta yang berpenghasilan rendah.

Survey yang dilakukan oleh *123.com* tahun 2017 menunjukkan terdapat empat kota lain di sekitar Jakarta sebagai pilihan tempat tinggal yaitu tanggerang (11, 39%), Bekasi (6.73%), depok (4,80%) dan bogor (3,78%). Sementara Jakarta masih menempati pilihan tertinggi yaitu 34.19%. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan bertempat tinggal di sebuah wilayah diantaranya dipengaruhi oleh pendapatan konsumen (Turner, 1968 dalam Hadi Sabari Y, 2004), persepsi harga rumah dan fasilitas umum (Catanese dan

synder1989), kemudahan akses (Lhust, 1997), kondisi lingkungan (Drabkin, 1980 dalam Malla Paruntung, 2004).

Berdasarkan survey di atas, Kota Bekasi menempati posisi kedua setelah Tangerang sebagai kota pilihan tempat tinggal penduduk sekitar Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Purbosari dan Hendarto (2012) menunjukkan bahwa Kecenderungan kaum urban memilih bertempat tinggal di Bekasi disebabkan oleh faktor ketersediaan fasilitas umum yang memadai, harga rumah yang ditawarkan, pendapatan dan kondisi lingkungan. Sementara aksesibilitas tidak menjadi indikator bagi mereka untuk bertempat tinggal di Kota Bekasi. Tidak heran jika investasi yang berkembang di Kota Bekasi saat ini didominasi oleh investasi hunian modern, pusat hiburan dan pasar *modern* (radarbekasi.go.id, 25 Agustus 2018).

Salah satu hunian modern yang berkembang di Kota Bekasi adalah hunian dalam bentuk perumahan. Perkembangan perumahan di Kota Bekasi dibanding kota penyangga Jakarta lainnya dapat dilihat pada tabel 1 dimana dari tahun 2003 hingga 2013 tampak bahwa Kota Bekasi memiliki perkembangan pembangunan perumahan paling tinggi, kemudian disusul oleh Tangerang 778 dan Bogor/Depok 808.

Tabel 1. Perkembangan Perumahan Kota Bekasi Tahun 2003-2013

Tahun	Jakarta	Bogor/Depok	Tangerang	Bekasi
2003	16	85	71	-
2004	10	162	285	-
2005	51	318	332	84
2006	662	2	-	-
2007	35	86	52	50
2008	915	12	25	-
2009	2 939	20	5	62
2010	710	23	-	708
2011	448	-	-	700
2012	210	-	8	150
2013	662	100	-	29
Total	6.658	808	778	1783

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id>

Perkembangan investasi untuk hunian modern secara tidak langsung dapat menciptakan degradasi lingkungan jika tidak didukung dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sinergis. Hal ini kemudian berujung pada pertanyaan bagaimana sistem pengambilan keputusan pemerintah dalam memberikan ijin investasi hunian dan bagaimana perilaku dari kaum urban? Kedua pertanyaan tersebut menjadi poin penting, karena sistem regulasi dan mentalitas kehidupan masyarakat dalam jangka panjang dapat berdampak pada kelangsungan kehidupan perkotaan yang aman dan nyaman. Tulisan ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai perkembangan hunian modern di Kota Bekasi dalam perspektif etika pembangunan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif non interaktif. Dalam Komariah dan Satori (2011) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, formula suatu resep, karakteristik suatu barang dan jasa, gaya-gaya, gambar-gambar, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif *non interaktif* (*non interactive inquiry*) atau disebut juga penelitian analisis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep-konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung dapat diamati. Sesuai namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan narasumber atau manusia. Akan tetapi menggunakan analisis mengenai data-data yang saling berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Sosial

Keadilan adalah isu yang akan diketahui sebagai suatu persoalan moral dan dapat juga didapatkan sebagai suatu persoalan hukum (Fredericson, 1985). Konsepsi keadilan sosial di satu pihak mewajibkan negara untuk menciptakan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara proporsional seraya membantu anggota-anggota yang lemah dan di lain pihak membantu masyarakat atau negara guna mencapai tujuannya. Nilai Keadilan sosial ingin dicapai dengan tujuan tersusunya suatu masyarakat yang seimbang dan teratur sehingga seluruh warga negara memperoleh kesempatan guna membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya akan mendapatkan bantuan.

Keadilan sosial mengandaikan adanya distribusi barang dan sumber-sumber daya secara adil. Kebijakan publik harus menjamin pemerataan sumberdaya yang terdapat di suatu negara dan yang lebih penting ialah bahwa ia harus mengedepankan kepentingan kelompok kelas yang paling tak beruntung yaitu kaum fakir dan miskin (Kumorotomo, 2014). Subjek utama keadilan adalah struktur dasar

masyarakat atau dapat juga dikatakan seperti bagaimana lembaga-lembaga sosial membagikan hak dan kewajiban fundamental dan menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial (Rawls, 1971). Fungsi struktur masyarakat adalah untuk membagikan sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar setiap orang (Rawls dalam Fattah, 2013). Lembaga-lembaga sosial yang dipahami oleh John Rawls sebagai konstitusi politik, aturan-aturan ekonomi dan aturan sosial yang pokok untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan layak, hak-hak kebebasan, pendapatan dan kesehatan.

Lebih lanjut, Rawls menjelaskan tentang dua prinsip keadilan. *Pertama*, Prinsip Kebebasan yang sama sebesar besarnya. Prinsip ini terdiri dari a) kebebasan berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan berbicara; c) kebebasan berkeyakinan; d) kebebasan menjadi diri sendiri; e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; f) hak untuk mempertahankan milik pribadi. *Kedua*, terdiri dari dua bagian yaitu a) prinsip perbedaan dan b) prinsip yang adil atas kesempatan. Prinsip perbedaan yang dimaksud bahwa perbedaan ekonomi atau sosial harus diukur sedemikian rupa agar memberikan maksimalisasi manfaat bagi kelompok yang

kurang beruntung. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan yang dimaksud bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Kelompok masyarakat dengan kompetensi, keterampilan dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama.

Urbanisasi sebagai akumulasi dari kapitalisasi terhadap kehidupan sosial memberi dampak sangat luas bagi kehidupan manusia. Apa yang dikatakan oleh Rawls mengenai prinsip-prinsip keadilan memberikan gambaran bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mencapai kesetaraan. Rawls dalam konteks deliberative nya mensyaratkan adanya ruang deliberasi bagi terwujudnya keadilan sosial. Ruang-ruang deliberasi sangat dibutuhkan dalam hal ini sebagai upaya mencari jalan tengah dari kepentingan warga negara.

Etika Pembangunan

Etika pembangunan lahir sebagai hasil perdebatan diantara para ahli pembangunan terutama yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan etika.

Perdebatan itu muncul ketika hasil pembangunan dianggap tidak merata. Dalam tugas-tugas pembangunan, aparat administrasi diharapkan memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya yang efektif dan efisien. Dia harus berorientasi pada kegiatan (bukan hanya terpaku pada aturan legalistic), mampu memecahkan masalah kemasyarakatan serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu kearah kemajuan. Singkatnya dia harus menjadi agen-agen perubahan (Kumorotomo, 2014).

Etika pembangunan menjadi suatu disiplin baru yang berkaitan dengan hal normative dalam dimensi pembangunan. Konsep etika pembangunan menjadi sangat relevan untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam praktek pembangunan. Goulet berpendapat bahwa etika pembangunan adalah "*the examination of ethical and value questions posed by development theory, planning, and practice*". Konsep etika pembangunan Goulet memiliki dua poin utama. *Pertama*, etika pembangunan menjadi prinsip-prinsip umum sebagai pedoman memformulasikan strategi-strategi yang etis; strategi etis dalam pengambilan keputusan dan praktik pembangunan yang spesifik; dan penyedia

standar normatif untuk mengevaluasi kinerja pembangunan. *Kedua*, memusatkan perhatian pada teori dan praktek pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan, keteraturan dunia, dan area antar-disiplin. Analisis formal yang dilakukan pada isu-isu: justifikasi utama pada hak asasi, kebutuhan, kapasitas dan hak menguasai; penilaian etika pada kebijakan yang berdampak pada korban dan marginalisasi akibat proses pembangunan; evaluasi kompetisi antara ekonomi, politik, dan sistem sosial; dan konsep baru mengenai keamanan (*security*).

Kumorotomo (2014) menyampaikan seperangkat komponen dalam etika pembangunan yaitu terpenuhinya kebebasan, persamaan, demokrasi dan partisipasi serta keadilan sosial dan pemerataan. (1) kebebasan berkaitan dengan hak yang melekat pada diri setiap individu karena martabatnya sebagai manusia bukan karena pemberian oleh masyarakat atau negara. Semestinya pembangunan dapat menjamin kebebasan individu yakni mencegah masyarakat dari kemungkinan tumbuhnya tirani atau kebijakan pembangunan semena mena yang hendak menukar modernisasi dengan martabat warga negara. (2) persamaan, menekankan pada nilai moral yang terkandung dalam pembangunan

ditentukan oleh seberapa jauh proses itu dapat menciptakan persamaan derajat bagi warga negara. Aspek persamaan juga berarti kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat. Persamaan kesempatan di negara berkembang akan bisa diwujudkan bila negara berperan aktif menciptakan peluang-peluang terutama bagi kaum miskin dan berpendidikan rendah. (3) demokrasi dan partisipasi, ditempuh agar cara-cara dalam melaksanakan pembangunan itu sesuai dengan keinginan rakyat sehingga apapun hasil dari pembangunan itu akan dapat dinikmati bersama. Konsep demokrasi mengandaikan bahwa masyarakat di segala tingkatan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut mereka. Bentuk monopoli yang dicengkram oleh para politisi, pejabat, teknokrat harus dihapuskan karena sesungguhnya mereka memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat. (4) keadilan sosial dan pemerataan, keadilan mempersoalkan struktur politik masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mencapai keadilan sosial harus membangun atau mengubah struktur proses politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga cukup kondusif bagi masyarakat memperoleh keadilan sosial. Mengupayakan keadilan sosial berarti menjamin seoptimal

mungkin agar setiap anggota masyarakat dapat memperoleh apa yang menjadi haknya serta bisa mendapatkan bagian yang wajar dari kemakmuran. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha menciptakan keadilan sosial adalah dengan menghapus ketidakadilan sosial.

Sejumlah komponen etika pembangunan yang disampaikan oleh Kumorotomo memiliki keterkaitan erat dengan bagaimana kebebasan merupakan aspek penting dalam keadilan sosial yang disampaikan oleh Rawls. Rawls mengusulkan pemilihan alternatif yang mempunyai kemungkinan paling baik dan aman. Cara itu dia sebut *Maximin Rule*. Dan menurut Rawls (1987), prioritas prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya akan menjamin hasil terbaik dari yang terburuk dalam ketidakpastian sekian banyak prinsip yang saling bersaing. Etika pembangunan memperlihatkan atas etika dan nilai-nilai dalam perencanaan maupun praktik pembangunan (Goulet, 1971). Goulet menyebut ada 3 komponen dalam memahami hakikat pembangunan yakni kecukupan, jati diri dan kebebasan.

Kajian mengenai konsep etika pembangunan yang dilakukan oleh Silsila Asri (2017) mengerucut pada suatu simpulan bahwa pembangunan tidak bisa

lepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Berkaitan dengan hal tersebut Rawls dalam kajiannya menjelaskan bagaimana posisi asli manusia sebagai makhluk moralis (Rawls dalam Fattah, 2013). Untuk mencapai struktur dasar masyarakat dalam kedudukan yang sama, syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa manusia harus keluar dari pengetahuan particular mereka (Rawls dalam Fattah, 2013).

Kota Bekasi dan Kebutuhan Hunian

Berdasarkan Intruksi Presiden No.13 bulan Juli 1976, diadakanlah pengembangan wilayah Jabodetabek untuk meringankan tekanan penduduk Jakarta yakni dengan cara membina pola pemukiman perkotaan dan penyebaran kesempatan kerja. Salah satu dari wilayah pengembangan kota tersebut adalah Kota Bekasi, mengingat wilayah ini memiliki potensi untuk berkembang (diakses pada: <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-76536.pdf> 16 Desember 2020). Perluasan wilayah Kota Jakarta merupakan sebuah alternatif untuk mengantisipasi pertumbuhan Kota Jakarta yang ketika itu makin pesat, kemudian tercetusnya gagasan bernama Jabodetabek melalui intruksi Presiden 13 tahun 1976. Pokok-pokok kebijaksanaan di dalam pengembangan wilayah Jabotabek

diantaranya adalah untuk menekan jumlah penduduk yang terus bertambah serta dapat meratakan penyebarannya yang tidak hanya terjadi di kota Jakarta melainkan kota-kota penyangga disekitarnya. Dengan begitu banyak beban kota Jakarta sebagai sebuah kota induk dari segi pembangunan ekonomi maka Bekasi dijadikan kota yang terkait dengan terbentuknya Jabodetabek.

Sejak Bekasi menjadi salah satu kota penyangga Ibukota, perkembangan Bekasi mulai terlihat menonjol pada saat orde baru dan adanya pemekaran di beberapa wilayah Bekasi. Bersamaan dengan intruksi Presiden tentang diadakannya pengembangan wilayah Jabodetabek. Akibat dari perkembangan yang cukup pesat secara tidak langsung berdampak pada pola pembangunan kota meliputi faktor-faktor infrastruktur dan perubahan sosial masyarakat di Bekasi. Bekasi berkembang bukan hanya menjadi tempat tinggal kaum urban namun juga berkembang menjadi sebuah kota industri barang dan jasa. Daerah yang dahulunya merupakan wilayah agraris kemudian bertransformasi menjadi kota industri. Arus modernisasi terus merambat terlihat dari banyaknya pusat perdagangan membuat pusat kota Bekasi seperti kota modern.

Faktor penyebab umum yang mendorong sebuah tempat atau daerah berkembang menjadi kota disebabkan karena berdekatan dengan daerah pusat pemerintahan dimana kondisi daerah lebih berkembang pesat di Indonesia masa orde baru. Peradaban kota menjadi gejala dalam bentuk-bentuk kebudayaan tertentu, seperti tempat-tempat yang dahulunya lahan sawah dan perkebunan kini menjadi tempat yang dibangun sebuah gedung-gedung tinggi, sehingga terciptalah tatanan baru dalam perkembangan kota.

Dibalik modernisasi bangunan perkotaan, dualisme pembangunan kota masih ditemui persoalan kemiskinan di pinggiran Bekasi. Kemiskinan perkotaan tampak pada permukiman kumuh yang berkembang. Berdasarkan data dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Bekasi tahun 2010, kawasan kumuh terdapat di beberapa wilayah kecamatan seperti; Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Medan Satria dan Bantargebang. Hal ini terdapat kesamaan dengan prediksi yang tertuang dalam dokumen RDTR Kota Bekasi untuk tahun 2006-2007, bahwa Kecamatan Bekasi Selatan merupakan salah satu kecamatan yang berpotensi besar meningkatnya pertumbuhan kawasan kumuh karena

merupakan pusat pengembangan permukiman, pusat perdagangan dan jasa, industri serta sebagai pusat pelayanan sosial.

Pembangunan Hunian “Beretika” di Kota Bekasi

Kota Bekasi sebagai wilayah penyangga Ibukota berkembang sangat pesat. Hirschman (1958) menjelaskan kemajuan disuatu titik menimbulkan tekanan, tegangan dan dorongan pada titik-titik di sekitarnya. Kemajuan pada lokasi di sekitar pertumbuhan adalah kondisi ideal yang diharapkan. Pembangunan ekonomi saja dianggap tidak cukup menjadi standar ideal pembangunan di suatu wilayah. Pembangunan yang cenderung menggenjot pertumbuhan banyak menjadi sorotan karena seringkali mengabaikan aspek-aspek lain seperti lingkungan dan kemanusiaan.

Secara ekonomi produktifitas kota Bekasi cukup signifikan dalam menyumbang percepatan pembangunan nasional terutama di bidang infrastruktur. Pada porsi yang lain, pembangunan sosial, politik dan lingkungan masih menjadi pekerjaan pemerintah kota seiring dengan derasnya urbanisasi dan ketatnya persaingan pasar. Keadaan ini pada akhirnya membuka ruang bagi pemilik modal menunjukkan ekistensinya.

Pembangunan hunian modern, perumahan elit dan kebijakan yang kurang berpihak pada kaum rentan, memaksa sebagian besar masyarakat tinggal di lingkungan yang kurang nyaman. Seperti kasus pembangunan Summarecon Bekasi yang berimbas pada meningkatnya resiko banjir di sekitar Kampung Rawabugel Kelurahan Margamulya, Bekasi Utara. Banjir tersebut disebabkan atas pembukaan tembok penghubung Summarecon Bekasi dan Kampung Rawabugel (beritabekasi.co.id, januari 2020).

Etika pembangunan yang menjadi titik tekan dalam penelitian ini adalah keadilan sosial. Rawls menyajikan keadilan sosial dalam dua prinsip: (1) kebebasan; (2) Perbedaan dan adil atas kesempatan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk hidup dalam kehidupan yang layak terbebas dari kondisi kemiskinan atau kemelaratan. Masyarakat di sekitar Kampung Rawabugel adalah potret atas ketidakadilan. Ketidakberdayaan atas modal dan mekanisme politik menjadikan mereka sebagai korban dan berujung pada ketimpangan pembangunan. Kuatnya pengaruh kapital seolah-olah menjadi penyebab runtuhnya keadilan bagi warga

yang terdampak. Persolan lingkungan maupun kemanusiaan dalam hal ini disebabkan bukan hanya faktor kapital (ekonomi), juga menitik beratkan pada nilai moral.

Perumahan modern dan persoalan lingkungan di sekitarnya adalah salah satu realitas pembangunan yang seringkali terjadi. Seperti halnya banjir, genangan air dan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan dampak yang tidak terbantahkan dari privatisasi dan akumulasi modal dari kaum kapitalis. Wijayanti dkk (2020) menduga faktor-faktor berkembangnya permukiman kumuh di Kota Bekasi adalah adanya titik kumuh tiap kelurahan, persentase anak penduduk miskin tidak sekolah, indeks perkembangan kelurahan, jumlah masyarakat berpendidikan rendah dan bangunan hunian yang tidak memiliki ijin. Faktor fisik dan non fisik (Persoalan sosial dan ekonomi) tersebut perlu mendapat perhatian dari sistem politik pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin mendapatkan hak hidup yang layak.

Meningkatnya investasi bidang konstruksi tahun 2017 dan menggeser sektor lain disebabkan oleh kebutuhan tempat tinggal yang sangat tinggi (RPJMD Kota Bekasi, 2018-2023). Mekanisme pasar yang

cenderung bebas tentunya akan berdampak pada kaum miskin yang semakin termarginalkan. Praktik pembangunan demikian sepertinya bertentangan dengan konsep kebebasan Rawls dimana kebebasan hanya dapat dibatasi dengan kebebasan itu sendiri. Dalam studi ini perlu adanya sistem untuk mendistribusikan hunian (*primary goods*) yang layak bagi kelompok-kelompok miskin.

Kehidupan masyarakat memerlukan dukungan negara untuk mengendalikan ketidakmerataan kekayaan dan pemusatan kekayaan di tangan kaum kapitalis. Proses komunikasi dan deliberasi berbagai aktor menjadi sangat penting karena dengan demikian persoalan-persoalan lingkungan maupun kemanusiaan di perkotaan dapat diminimalisasi. Hal ini menjadi salah satu prinsip kebebasan yang disebut oleh Rawls bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi dapat diatur sehingga keuntungan dapat dirasakan oleh setiap orang (Rahman, 2010). Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal dalam hal ini Institusi politik maupun birokrat tidak cukup hanya sebagai “penjaga malam” yang meminimalisasi peran negara sehingga kepentingan para kapitalis menjadi berkembang. Negara harus hadir dalam mengendalikan kebebasan pemilik modal

untuk memberikan keuntungan bagi pihak lain yang kurang beruntung.

Persamaan adalah terpenuhinya hak menyuarakan pendapat. Demokrasi mengandaikan bahwa masyarakat di segala tingkatan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut mereka. Bentuk monopoli yang dicengkram oleh para politisi, pejabat maupun teknokrat harus dihapuskan karena sesungguhnya mereka memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat. Proses negosiasi antara masyarakat di sekitar pembangunan hunian modern, pengembang, pemilik modal dan aktor-aktor politik perlu duduk bersama (*face-to-face dialog*) untuk mencari jalan tengah atas kemungkinan persoalan-persoalan yang akan terjadi. Partisipasi masyarakat menentukan kehidupan yang demokratis. Keterlibatan masyarakat dalam rencana pembangunan hunian menjadi sangat penting untuk menghindari kerugian lingkungan dan krisis kemanusiaan. Kolaborasi menjadi kunci membangun kehidupan demokrasi.

Studi lain pada kasus pembangunan apartemen Bintara Residence, Bekasi Barat. Diberitakan oleh kompas.com, pada 2016 lalu, ratusan warga Perumahan Griya Bintara Indah melakukan unjuk rasa menolak rencana pembangunan apartemen

tersebut. Mereka mewakili 3.000 keluarga penghuni tiga perumahan yang terdampak pembangunan apartemen, yakni Griya Bintara Indah, Pondok Cipta, dan Bintara Lika. Mereka menyatakan ijin prinsip pembangunan apartemen memang sudah keluar, tetapi warga tidak pernah diajak bicara. Unjuk rasa dilakukan karena selama proses pembangunan berlangsung muncul genangan air di sekitar tiga perumahan tersebut yang mengganggu aktifitas dan rutinitas warga perumahan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, ditentukan oleh paradigma berfikir dari pembuat kebijakan. Ketidakberdayaan masyarakat tergantung dari cara pandang politisi yang memandang bahwa kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah dianggap sangat terbatas baik dalam aspek teknis maupun sikap/perilaku berdemokrasi. Selain itu masih banyak peraturan birokrasi yang berorientasi “proyek”. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan institusi lokal pun dilakukan dengan mental proyek (Djaelani, 2011).

Kemakmuran rakyat adalah cerminan dari proses menciptakan keadilan sosial. Konsekwensi dari upaya menciptakan kemakmuran yaitu melalui rangkaian program - program pemerataan pembangunan. “Apa yang menjadi

kebutuhan kaum marginal”?. Pertanyaan tersebut semestinya menjadi prioritas program-program kebijakan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya menyangkut “bagaimana kaum miskin memenuhi kebutuhan hidup mereka?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak mungkin dapat diketahui tanpa pelibatan unsur masyarakat miskin dalam perencanaan pembangunan.

Kecamatan Bekasi Utara adalah salah satu kecamatan yang terdampak akibat pesatnya pembangunan kawasan salah satu hunian modern “Summarecon Bekasi”. Dampak yang dirasakan adalah meningkatnya jumlah permukiman warga yang terkena banjir. Bahkan sempat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dimana banjir mencapai lima meter akibat banyaknya jumlah pembangunan apartemen dan hunian modern di sekitar Kali Bekasi. Wilayah yang semestinya digunakan sebagai cekungan air justru digunakan sebagai alternative pembangunan apartemen dan perumahan. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan tempat tinggal bagi para urban dan peningkatan investasi yang cukup besar dari para pengembang (Yuniarti, 2018). Tidak heran jika masalah publik yang berkembang di Kota Bekasi didominasi oleh isu lingkungan yang

semakin kritis. Seolah-olah kehidupan yang diciptakan dengan kenyamanan dan kelayakan diperuntukkan bagi orang-orang kaya sementara bagi kaum pinggiran dengan taraf perekonomian yang lemah menjadi tidak berdaya.

Pembangunan yang ditinjau hanya dari aspek matriil tidak cukup untuk meninjau keberhasilan pembangunan sebuah wilayah. Keberhasilan pembangunan yang seringnya dipresentasikan melalui pertumbuhan ekonomi semetinya dibarengi dengan pemerataan (Kartasmita, 1996). Pemerataan adalah syarat mutlak terciptanya keadilan sosial dalam pembangunan. Pemerataan tidak hanya pada batas kualitatif maupun deskriptif. Subtansi daripada pemerataan harus berbasis bukti (*efidenceI*) yakni potret kehidupan modern yang nyata terdistribusi pada seluruh wilayah kota. Tidak parsial, tidak pula menampilkan dualisme wajah pembangunan.

SIMPULAN

Pembangunan perkotaan seringkali menyisakan persoalan bahkan berakhir bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Modernisasi semestinya dilakukan melalui pendekatan-pendekatan etis. Keberadaan etika pembangunan menekankan hadirnya keadilan sosial.

Prinsip keadilan sosial dalam penelitian ini memandang perlunya pengambilan keputusan (ijin hunian modern) dengan lebih memperhatikan aspek partisipasi dan komunikasi melalui ruang-ruang deliberasi. Kondisi demikian dapat terjadi melalui peran negara untuk membuka akses demokrasi yakni melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak dalam pembangunan hunian modern untuk menghindari resiko bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Silsila. 2017. Etika dalam Pembangunan Internasional. *Jurnal of International Studies*. Vol 6 No. 1 Mei 2017. Hal: 40-54
- Catanese, Anthony J. and James C. Synder. 1989. *Perencanaan Kota Edisi Kedua*: Jakarta: Erlangga
- Deliyanto, Bambang dan Sumarsono. 2018. *Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kota*. Naskah Publikasi Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka.
- Djaelani, Moh. S. 2011. Analisis Kebijakan Penataan Ruang dan Dukungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan (Suatu Studi di Kota Bekasi). *JPSL*. Vol. (1) 2: 135-145 Desember 2011
- Fattah, Damanhuri. 2013. Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. *TAPIS* Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013. Hal: 30-45
- Frederickson, H. George. 1985. *The Public Service and The Patriotism of Benevolence In: Classic Of Administrative Sayre*
- Goulet, Denis. *The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development*. New York: Atheneum, 1971.
- Hirschman. Albert O. 1958. *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press: New Haven
- Hart, David. K. 1974. *Social equity justice and the equitable administrator*. *Public Administration Review* , 34 January-February
- Kartasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO
- Kumorotomo, Wahyudi. 2014. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lusht, Kenneth M. 1997. *Real Estate Valuation Principles and Applications*. Chicago: Irwin Book Team
- Purbosasi dan Hendarto, 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Bertempat Tinggal di Kota Bekasi Bagi Penduduk Migran Berpenghasilan Rendah Yang Bekerja di Kota Jakarta. *Jurnal Of Economic* Vol. 1 No. 1 Tahun 2012 Hal: 1-15
- Rahman, M. Taufiq. 2010. Pertautan Kebebasan dengan Keadilan: Studi Atas Pemikiran Jhon Rawls. *Jurnal Mimbar Studi*. Vol. XXXIV/Nomor 1/ Januari-Juni ISSN 0216-9517. Hal: 87-98

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*.
Cambride, Mass: The Belknap Press of
Harvard University Press

Wijayanti, dkk. 2020. Identifikasi Spasial
Faktor-Faktor Penyebab Permukiman
Kumuh di Kota Bekasi. *Jurnal Tata
Loka* Vol. 22 No. 4 November 2020.
Hal. 573-585 E ISSN 2356-0266

Yunus, Hadi sabari. 2004. *Struktur Tata
Ruang Kota FT* (Cetakan 4).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yuniarti, dkk. 2018. Perspektif Media
Online Terhadap Kasus Pembangunan
Permukiman di Kota Bekasi
menggunakan Pendekatan *Agenda
Setting*. *Jurnal Pekommas* Vol. 3 No. 2,
Oktober 2018: 179-190